

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak yang dipungut oleh negara dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum kepada masyarakat, dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Ini merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan serta merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 mencerminkan ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak.

Pelaksanaan Undang-Undang di atas masih memerlukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 merupakan hasil penyempurnaan dari kedua Undang-Undang tersebut sehingga diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat akan adanya sistem perpajakan yang bersih dan menjunjung tinggi asas keadilan. Perubahan sistem perhitungan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* telah memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang secara teratur. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak secara birokratis akan dapat dihindari.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha maupun pemerintah. Beberapa asumsi tentang parameter makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2001 memperlihatkan adanya kecenderungan yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Di masa ekonomi yang masih sulit dan belum pulih, realisasi penerimaan pajak malah diharapkan meningkat. Target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan meningkat sebesar Rp 152.420,0 miliar atau sekitar 78,76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang besarnya Rp 85.226,2 miliar. Hal ini membuat pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar realisasi pajak dapat tercapai dengan cara menaikkan tarif pajak. Ini akan menyulitkan para pengusaha sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak karena jumlah yang dikenakan semakin tinggi. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan diharapkan mampu untuk mengelola keuangan perusahaan terutama pajak agar tidak memberatkan perusahaan. Hal ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan terutama di bidang industri karena pajak merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan harga pokok produksi, harga jual produk maupun laba yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Industri pengolahan kayu (wood working) merupakan salah satu industri yang cukup pesat perkembangannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa beberapa

tahun terakhir ini investasi di bidang kayu olahan (*wood working*) semakin bertambah. Investasi di sektor kayu olahan ini meningkat sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan No. 305/KP/X/86 tahun 1986 tentang larangan ekspor sebagian kayu gergajian (*saw timber*). Selain itu pada tahun 1998 dikeluarkan lagi larangan ekspor kayu gergajian yang bernilai rendah dan meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari industri perkayuan sehingga secara bertahap pemerintah membatasi ekspor produk-produk kayu yang tidak diolah lebih lanjut seperti kayu gergajian (*saw timber*) setelah sebelumnya mengeluarkan larangan untuk ekspor kayu log (*kayu bundar*).

Realisasi produksi kayu di Indonesia terus meningkat sekaligus diikuti peningkatan realisasi ekspor menunjukkan bahwa produk *wood working* Indonesia telah mampu bersaing di pasaran internasional. Pergeseran pola perdagangan ekspor dari produk gergajian (*saw timber*) ke produk kayu olahan yang lebih hilir dapat dilihat dari perkembangan ekspor produk *wood working* yang semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari penyempurnaan Undang-undang Perpajakan, yaitu menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non-migas, barang hasil olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000 atas ekspor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 0% (*nol persen*).

Industri di bidang perkayuan semakin lama semakin maju dan jenis-jenis yang diproduksi pun semakin bervariasi sesuai dengan meluasnya pemakaian bahan baku kayu sebagai material untuk berbagai macam kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa produk perkayuan sangat diminati oleh masyarakat dan hampir sebagian besar dibuat dalam bentuk perabotan. Kayu olahan yang diekspor juga membuktikan bahwa tidak hanya di dalam negeri saja produk tersebut diminati, akan tetapi juga di luar negeri.

Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) merupakan industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih. Kayu yang diambil ditampung di suatu tempat yang disebut Tempat Penimbunan Kayu Industri Pengolahan Kayu Hulu (*log pond industry*). Tempat ini digunakan sebagai tempat penimbunan kayu industri pengolahan kayu hulu yang mempunyai fungsi menerima, menimbun, dan mengeluarkan kayu bulat dan atau bahan baku serpih di industri yang bersangkutan. Persediaannya meliputi hasil tebangan, kayu olahan, barang dalam proses, suku cadang (*spare part*), bahan pembantu dan perlengkapan. Hasil tebangan atau kayu bulat (*logs*) biasanya ditemukan di tiga lokasi, yaitu lokasi pengumpulan atau penimbunan hasil hutan (*log pond* atau *log pond antara* atau *log yard*), lokasi tebangan (*TPN*), dan *log pond industry* (IPKH).

Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari penanaman, pemeliharaan dan pemungutan, tergantung dari riap (*growth*) tegakan hutan yang akan ditentukan oleh rotasi atau daur tanaman.



Pengertian hasil dalam pengusahaan hutan meliputi:

1. Hasil tebangan
2. Hasil olahan
3. Hasil hutan lainnya

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Oleh karena itu, CV. Teja Mulia Kramasan sebagai salah satu industri pengolahan kayu di Palembang tidak terlepas dari kewajibannya sebagai Wajib Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan atau jasa. Kegiatan utamanya adalah memproduksi kayu olahan berupa *moulding*, yaitu *dowel* dan *decoratif* yang diekspor ke luar negeri yang sistem pemesanannya dilakukan lewat L/C (Letter of Credit). Sistem perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan masih sangat sederhana walaupun perusahaan tergolong cukup besar. Sistem perpajakannya tidak lagi sesuai dengan keadaan ekonomi dan perusahaan itu sendiri untuk masa sekarang ini.

Oleh karena itulah penulis mengambil judul **Penilaian atas Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Teja Mulia Kramasan Palembang.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, diketahui bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah :

1. Barang-barang apa yang dihasilkan oleh perusahaan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai
2. Bagaimana sistem perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan
3. Bagaimana sistem pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan.
4. Adanya perbedaan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dituangkan dalam Surat Pembeitan Masa dengan hasil pemeriksaan pajak.

Dalam laporan akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada sistem perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Teja Mulia Kramasan Palembang.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Mempelajari sistem perpajakan yang dijalankan oleh CV. Teja Mulia Kramasan Palembang

2. Mengetahui sebab-sebab timbulnya masalah yang dialami oleh CV. Teja Mulia Kramasan Palembang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
3. Untuk mengetahui sejauh mana aplikasi teori yang penulis pelajari dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh perusahaan
4. Untuk menambah wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu :

1. Penelitian lapangan ( Field Research )

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan yang penulis wawancarai adalah Direktur perusahaan dan beberapa karyawan di bidang keuangan.

- b. Observasi langsung

Observasi langsung merupakan metode pengamatan secara langsung yang penulis lakukan, yaitu dengan datang langsung ke lokasi perusahaan.

2. Studi kepustakaan ( Library Research )

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari beberapa literatur, buku-buku, majalah, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah perpajakan.

Untuk menganalisis permasalahan yang ada pada CV. Teja Mulia Kramasan Palembang dilakukan dengan menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan tepat mengenai pembahasan masalah dengan cara membandingkan dan mengimplementasikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-sub.

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai apa yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II        LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis, meliputi pengertian dan jenis-jenis pajak, pengertian atas Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, objek Pajak Pertambahan Nilai dan pengecualiannya, subjek Pajak Pertambahan Nilai dan pengecualiannya, serta mekanisme Pajak Pertambahan Nilai.



### **BAB III      GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Mengemukakan secara keseluruhan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan beserta pembagian tugasnya, dan sistem perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan.

### **BAB IV      ANALISIS    ATAS    SISTEM    PERHITUNGAN    DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI CV. TEJA MULIA KRAMASAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis atas hasil produksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, analisis atas sistem perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan, dan analisis sistem pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya.

### **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Kesimpulan mencakup inti dari hasil penulisan skripsi, sedangkan saran merupakan kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan guna mengatasi masalahnya.